

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SURABAYA**

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 ini memberikan gambaran utuh terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Laporan Kinerja tersebut juga memaparkan perencanaan strategis sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang diemban, serta pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021. Selain itu dijabarkan juga Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2021 beserta seluruh indikator kinerja dan targetnya, hasil capaian kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan strategis pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perencanaan Perangkat Daerah menjadi berkesinambungan.

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon III	5
2	Eselon IV	8
3	Staff (PNS)	20
4	CPNS	1
5	Tenaga Outsourcing	135
Jumlah		169

Tabel 1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	21
3	Golongan II	9
4	Golongan I	1
5	Tenaga Outsourcing	135
Jumlah		169

Tabel 1.3 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatannya

No.	Unit Kerja	Status Pegawai			Jumlah per Unit Kerja
		PNS	CPNS	Tenaga Outsourcing	
1	Sekretariat	9	1	51	61
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan	5	-	7	12
3	Bidang Kesejahteraan Keluarga	7	-	33	40
4	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	-	7	14
5	Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak	5	-	37	42
Jumlah (orang)					169

Pada Tahun 2021 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), di Sekretariat didukung personil sejumlah 9 orang PNS dan 1 orang CPNS serta 51 Tenaga Outsourcing yang terdiri dari 14 orang satgas outreach, 9 orang tenaga keamanan dinas, 8 orang tenaga operasional, 12 orang tenaga administrasi dan sejumlah 8 orang untuk ditempatkan sebagai Satgas Command Center.

Pada bidang Pemberdayaan Perempuan didukung personil PNS sejumlah 5 orang dan 7 outsourcing sebagai tenaga administrasi, di bidang Kesejahteraan Keluarga terdapat 7 orang PNS dan 33 orang outsourcing yang ditempatkan di rumah kreatif klakah rejo sejumlah 2 orang, ditempatkan di PUSPAGA sebagai konselor sejumlah 7 orang, ditempatkan sebagai SPG di stan UMKM Bungurasih dan Balai Kota 4 orang dan 20 orang sebagai tenaga administrasi maupun pendamping.

Sumber Daya Manusia di bidang Keluarga Berencana di dukung personil PNS 7 orang dan terdapat 7 orang outsourcing sebagai tenaga administrasi, untuk bidang Pengarusutamaan Hak Anak, perlindungan perempuan dan Anak didukung 5 orang PNS dan 37 orang tenaga outsourcing yang ditugaskan di Shelter ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sejumlah 11 orang, di Shelter Perempuan sejumlah 9 orang dan 17 orang sebagai tenaga administrasi.

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya sebagai Lembaga Teknis Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus yaitu di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan dan monitoring di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota. Selain itu juga memberikan pelayanan dengan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pemberdayaan

ekonomi penduduk miskin skala kota. Di bidang perlindungan perempuan dan anak bentuk layanan yang diberikan adalah koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terutama perlindungan dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak skala kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

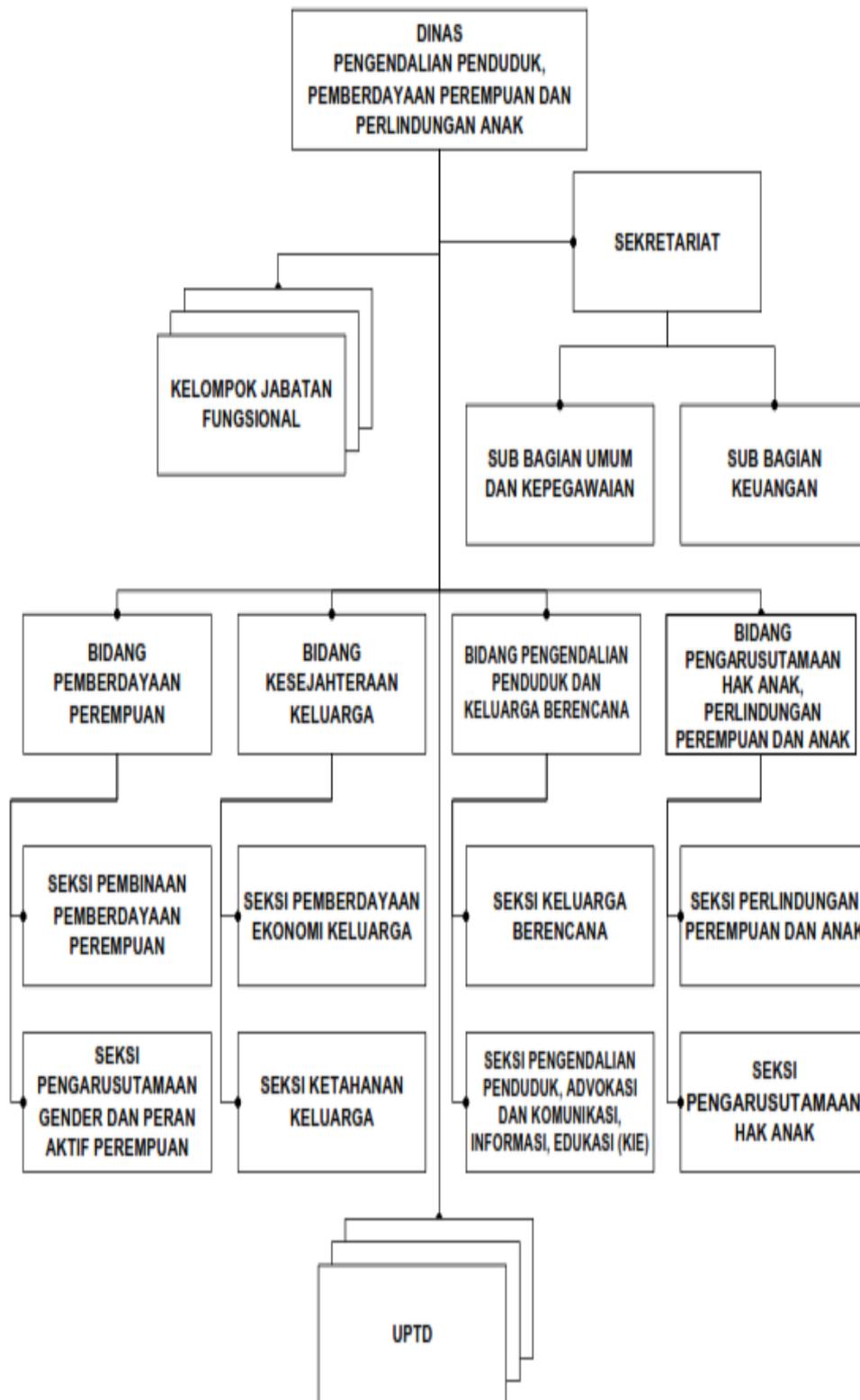
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan.
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- b. Seksi Ketahanan Keluarga.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
 - a. Seksi Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak.
6. UPTD.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA



ISU-ISU STRATEGIS

- 1) Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:
 - a. Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
 - b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang). Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan perempuan yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan inkubasi usaha mandiri, dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi melalui promosi dan pameran.

- 2) Isu Nasional dan Global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan harapan pencapaian pada tahun 2030. 17 target sasaran utama:
 1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
 4. Pendidikan berkualitas
 5. Kesetaraan Gender
 6. Air Bersih dan Sanitasi
 7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Mengurangi Kesenjangan
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
13. Aksi Terhadap Iklim
14. Kehidupan Bawah Laut
15. Kehidupan di Darat
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, mengurangi eksposur dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim, guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya maupun bencana.
2. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional
3. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
4. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
5. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya.

6. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan maupun perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
7. Meningkatkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk akses ke layanan keuangan.
8. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

3) Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:

1. Terpenuhinya anggaran kegiatan.
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran.
3. Kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan, pembinaan dan pelatihan keluarga berpendapatan rendah.
4. Kewenangan untuk melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
5. Pendataan keluarga miskin berbasis IT.

b. Kelemahan yang dimiliki terdiri dari:

1. Jumlah dan Kompetensi SDM.
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.

3. SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan.

4) Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang muncul bisa diidentifikasi melalui peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat.
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar Perangkat Daerah.

b. Ancaman yang dimiliki antara lain:

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Mentalitas sebagian masyarakat miskin.
3. Masih ada sedikit program dan kegiatan antar Perangkat Daerah yang beririsan.
4. Adanya data diluar data keluarga miskin yang telah ditetapkan.
5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak.

5) Formulasi Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021, isu-isu tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat serta pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.
3. Keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat yang menunjang pelaksanaan program.
4. Adanya kewenangan untuk melaksanakan program perlindungan perempuan dan anak sehingga permasalahan perempuan dan anak tertangani dengan baik.

LANDASAN HUKUM

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2021 ini disusun sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. GAMBARAN UMUM
 - C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
 - D. ISU-ISU STRATEGIS
 - E. LANDASAN HUKUM
 - F. SISTEMATIKA PENULISAN
- Bab II : PERENCANAAN KINERJA
 - A. PERENCANAAN STRATEGIS
 - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - C. PERJANJIAN KINERJA
- Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. CAPAIAN KINERJA
 - B. REALISASI ANGGARAN
- Bab IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2016-2021, memiliki 1 visi yang didukung dengan 7 misi. Dari 7 misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menindaklanjuti misi ke-1 dan ke-7, yaitu “Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha” dan “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

PERENCANAAN STRATEGIS

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap Instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*). Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah, melalui perencanaan strategis diharapkan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

a) Tujuan dan Sasaran

Terkait perubahan misi Kota Surabaya berdasarkan Perubahan RPJMD 2016-2021 maka Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan tujuan pembangunan mengacu pada Misi ke-1 dan Misi ke-7 Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI	
Misi Kota Surabaya (Perubahan RPJMD 2016-2021)	Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah (Perubahan RPJMD 2016-2021)
Misi 1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	1. Meningkatnya pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Misi 2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	
Misi 3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	
Misi 4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	
Misi 5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	
Misi 6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah	

lingkungan	
Misi 7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta upaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Tabel 2.1 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	- Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Persentase Indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak
		Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan	Persentase kecamatan yang belum responsif gender
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Hubungan Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan Perubahan RPJMD 2016-2021 Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
Tujuan: Meningkatnya pengarusutamaan gender,	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi.	%	(Jumlah indikator KLA yang terpenuhi : Jumlah indikator KLA) x 100%.	DP5A

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. [1.1.9]	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	Komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki	DP5A
Sasaran:				
Meningkatnya kualitas pelayanan KB . [110]	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap.	%.	(Capaian peserta KB Mantap : Target peserta KB Mantap) X 100%.	DP5A
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. [116]	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha.	%.	Jumlah masyarakat yang aktif mengikuti aktivitas pengembangan usaha /Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengembangan usaha.	
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan. [99]	Persentase kecamatan yang belum resposif gender .	%.	(Jumlah Kelurahan yang responsif gender sampai dengan tahun (t) / jumlah Kelurahan) x 100%.	DP5A
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak. [98]	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak.	%.	(Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditemukan/dilaporkan) x 100%.	

PERJANJIAN KINERJA

Dari IKU Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, dirumuskan target untuk masing-masing IKU dan indikator pendukung pelaksanaan IKU lainnya sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis. Di tahun 2021, telah dirumuskan target tersebut dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2021 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2021 dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tujuan:		
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. [1.1.9]	Indeks Pembangunan Gender (IPG).	93,7
		Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	100%
	Sasaran:		
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. [116]	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha.	25%
	Meningkatnya kualitas pelayanan KB . [110]	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap.	100%
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak. [98]	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak.	100%	
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan. [99]	Persentase kecamatan yang belum resposif gender .	0%	

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa program dan kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021

Program dan Sub Kegiatan	Indikator Program dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100	%
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN 100 %	100	%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran 100 %	100	%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelurahan yang responsif gender	41,56	%
	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100	%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	72	Lembaga
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	23	Kali
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100	%

Program dan Sub Kegiatan	Indikator Program dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	2	Dokumen
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	25	Orang
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926	Orang
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan ramah anak	100	%
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154	Kelurahan
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431	Lembaga
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74,98	%

Program dan Sub Kegiatan	Indikator Program dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100	%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200	Kasus
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2	Lembaga
	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	75	Orang
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19,22	%
	Persentase peserta KB aktif	80,95	%
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2,78	%
	Persentase peserta KB baru	97,94	%
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1566	Orang
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader IMP yang dibina	1566	Orang
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950	Orang
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	19	Unit

Program dan Sub Kegiatan	Indikator Program dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	42	Orang
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibina	31	Lembaga
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100	%
	Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10,33	%
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	50	Orang
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	38	Unit
	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama	1	Bangunan

Program dan Sub Kegiatan	Indikator Program dan Sub Kegiatan	Target	Satuan
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	310	Orang
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	875	Orang
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2	Lembaga
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15	Lembaga
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88	%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100	%

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak kinerja. Adapun rincian anggaran per kegiatan pada masing-masing program tertuang pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan

Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp 11.132.285.009
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.762.806.462
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 369.478.547
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Rp 1.050.047.791
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 377.689.171
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 672.358.620
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rp 251.199.169
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 251.199.169
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp 231.105.948
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 145.942.050
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 85.163.898
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rp 803.068.048
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 213.172.000

Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 589.896.048
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp 2.569.084.419
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 940.284.843
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1.628.799.576
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rp 8.759.282.847
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 966.207.266
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 1.635.538.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 2.705.778.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp 1.550.398.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 329.537.581
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp 1.571.824.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Rp 2.989.464.963
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp 899.036.417
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 695.935.024

Program dan Sub Kegiatan		Anggaran (Rp.)
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 328.233.924
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 131.145.000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 556.907.471
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 378.207.127
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Rp 3.440.741.306
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.440.741.306
TOTAL		Rp31.226.279.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini disampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi baik kinerja maupun realisasi kegiatan yang dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan efisiensi penggunaan sumber daya, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja tersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja 2021 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2021. Berdasarkan data di E-MONEV 2021 Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Tujuan:				
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.7	93.58	99.87%
	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	100%	100	100%
2. Tujuan:				
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	81	80.38	99.23%

Tujuan meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak diputuskan berdasar Perubahan RPJMD 2016-2021 dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan ketimpangan gender dan memiliki formulasi *rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki*. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan target yang harus dicapai 93,7%. Pada tahun 2021 berdasarkan E-monev tahun 2021 diperoleh realisasi 93,58% (sumber data Bappeko diolah 2021 (regresi logistik)) dengan capaian 99,87%. Berdasarkan realisasi tersebut maka Pembangunan Kota Surabaya sudah Responsif Gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya yang mengalami peningkatan berkat peran serta dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi memiliki formulasi (*Jumlah indikator KLA yang terpenuhi : Jumlah indikator KLA*) x 100% dengan target yang harus dicapai 100%. Pada tahun 2020 diperoleh realisasi 100 dengan capaian 100%. Hal tersebut membuktikan adanya komitmen Kepala Daerah dalam pemenuhan hak anak melalui program Pemerintah Kota Surabaya di masing-masing Perangkat Daerah dan Sinergitas antara Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak.

Tujuan Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki formulasi *Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB* dengan target nilai 81. Pada tahun 2021 didapatkan realisasi nilai 80,38 dengan capaian 99,23 %. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Surabaya dalam

meningkatkan Nilai SAKIP Kota Surabaya sesuai arahan Kementerian PAN dan RB

Capaian kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya tahun 2021 dijelaskan di realisasi sasaran monev 2021, untuk masing-masing sasaran dari tujuan dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan : 1. Meningkatnya pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Sasaran : 1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB
1.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
1.3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan
1.4. Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran : 2.1. Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator	Target	Perhitungan	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100%	$135/135 \times 100$ (higher is better)	100	100%
Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	$100/100 \times 100$ (Sumber Data Bappeko, diolah, 2021)	100	100%

Sasaran	Indikator	Target	Perhitungan	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan	Persentase kecamatan yang belum responsif gender	0%	$0/31 \times 100$ (lower is better)	0	200%
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	100%	$1174/1950 \times 100$ (higher is better)	60.21	60.21%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha	25%	$2/8 \times 100$ (higher is better)	25	100%

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	100%	95,86%	87,63%	100%	108,11%	60,21%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha	25%	100%	99,36%	23,33%	25%	25%
Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan	Persentase kecamatan yang belum responsif gender	0%	51,61%	38,71%	29,03%	6,45%	0%
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	100%	93,73%	93,87%	99,59%	99,75%	100%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan KB memiliki indikator kinerja persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi mantap, dengan target 100%, memiliki formulasi (Capaian peserta KB Mantap : Target peserta KB Mantap) X 100%. Pada tahun 2021 didapatkan realisasi sebesar 60,21. Capaian ini menunjukkan bahwa target tidak tercapai dan juga telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Hal ini dikarenakan metode kontrasepsi KB Mantap terdiri dari MOP dan MOW belum dapat dilaksanakan karena Pasangan Usia Subur (PUS) masih khawatir terhadap penularan Covid-19 serta diwajibkan untuk melakukan Swab Test dan protokol kesehatan yang ketat dari tenaga kesehatan faskes pelayanan KB Mantap sehingga PUS hanya memakai metode kontrasepsi jangka pendek.

Sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki indikator kinerja Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha, dengan target 25% memiliki formulasi (Jumlah masyarakat yang aktif mengikuti aktivitas pengembangan usaha /Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengembangan usaha) X 100%. Pada tahun 2021 didapatkan realisasi 25%. Capaian ini menunjukkan bahwa target telah terpenuhi sama dengan capaian di tahun 2020, Target ini dapat terpenuhi karena tingginya motivasi peserta sosialisasi untuk pengembangan usaha.

Sasaran Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan memiliki indikator kinerja Persentase kecamatan yang belum responsif gender, dengan target 0% memiliki formulasi Kecamatan yang belum responsif gender adalah Kecamatan yang belum memenuhi 7 prasyarat Pengarusutamaan Gender. Pada tahun 2021 didapatkan realisasi 0%. Capaian ini menunjukkan bahwa target telah terlampaui dan juga telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu 6,45%. Perhitungan *lower is better* menunjukkan bahwa di Surabaya tidak ada Kecamatan yang belum responsive gender.

Sasaran Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki indikator Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak, dengan target 100% memiliki formulasi (Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditemukan/dilaporkan) x 100%. Pada tahun 2021 didapatkan realisasi 100%, capaian ini menunjukkan bahwa target telah tercapai. Hal tersebut menunjukkan adanya Sinergitas Jejaring, OPD & NGO/LSM dalam menanggapi permasalahan

Perempuan dan Anak, Kesadaran Keluarga/Masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan Perempuan dan Anak pada PPTP2A, Adanya kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan kekerasan Perempuan dan Anak.

Sasaran Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan memiliki indikator Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan target 100%. Pada tahun 2021 realisasi yang tercapai 100%. Capaian tersebut didapatkan dari hasil survey yang tertera di website e-moneyv 2021.

- **Capaian realisasi Program dan Kegiatan**

Dalam menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa program yang kemudian diwujudkan dalam beberapa sub kegiatan. Pada tahun 2021 terdapat 9 (sembilan) program yang dilaksanakan, dengan jumlah kegiatan 15 (lima belas) dan jumlah sub kegiatan 24 (dua puluh empat). Adapun indikator program, realisasi indikator program hingga akhir tahun, dan capaiannya pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Program

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100.00	100%
	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	100.00	100%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelurahan yang responsif gender	41.56%	34.42	82.81%
	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%	100.00	100%

Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	100%	100.00	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100.00	100%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelurahan ramah anak	100%	99.35	99.35%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	74.98%	82.27	109.72%
	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100.00	100%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	19.22%	18.67	102.86%
	Persentase peserta KB aktif	80.95%	81.33	100.47%
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	2.78%	0.22	192.15%
	Persentase peserta KB baru	97.94%	63.62	64.96%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	100%	100.00	100%
	Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	10.33%	12.00	116.17%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	88%	90.62	102.98%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator pertama persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. Indikator kedua yaitu Tingkat kepuasan

pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. Nilai tersebut tertera berdasarkan emonev 2021 melalui survey kepuasan pegawai terhadap terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan administrasi perkantoran diupayakan sesuai permintaan dengan parameter survey Kepuasan pegawai dihitung dengan parameter ketersediaan dan kualitas ATK, penyediaan sarana dan prasarana rapat (ruangan, konsumsi, laptop/LCD projector, meja, kursi, AC), kebersihan lokasi kerja (tenaga kebersihan dan peralatannya), ketersediaan dan kualitas sarana penunjang kerja (barang pakai habis komputer dan printer), keamanan kantor (tenaga keamanan), ketersediaan dan kualitas pelayanan kelistrikan, ketersediaan air bersih, ketersediaan sarana komunikasi.

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator pertama persentase kelurahan yang responsif gender memiliki target 41,56%, realisasi 34,42%, dan capaian 82,81%. Hal ini disebabkan beberapa kelurahan belum memahami PPRG dan berfokus pada penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing sebagai garda terdepan. Indikator kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak** dengan indikator persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. Target dapat dicapai karena perangkat daerah mampu menyusun *Gender Analysis Pathway*, *Gender Budget Statement*, dan Kerangka Acuan Kegiatan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran responsive gender.

Program Perlindungan Perempuan dengan indikator persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** dengan indikator Persentase kelurahan ramah anak memiliki target 100%, realisasi 99,35, dan capaian 99,35%. **Program Perlindungan Khusus Anak** dengan indikator pertama persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) memiliki target 74,98%, realisasi 82,27%, dan capaian 109,72%. Indikator kedua yaitu persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. Target program-program dapat dicapai karena didorong oleh Sinergitas Jejaring OPD & NGO/LSM dalam menanggapi permasalahan Perempuan dan Anak, Kesadaran Keluarga/Masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan Perempuan dan Anak pada PPTP2A, Adanya kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Kota

Surabaya terhadap kecepatan dan ketepatan penanganan kekerasan Perempuan dan Anak.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan empat indikator. Pertama, persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) memiliki target 19,22%, realisasi 18,67, dan capaian 102,86%. Capaian tersebut disebabkan semakin tinggi kepedulian Pasangan Usia Subur untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang. Kedua, persentase peserta KB aktif memiliki target 80,95%, realisasi 81,33, dan capaian 100,47%. Hal tersebut dikarenakan Pasangan Usia Subur tetap memakai kontrasepsi jangka panjang maupun pendek untuk membatasi jumlah kelahiran anak. Ketiga, persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi memiliki target 2,78%, realisasi 0,22, dan capaian 192,15%. Tingginya angka capaian karena sistem perhitungan *lower is better* yang menunjukkan bahwa Pasangan Usia Subur tidak banyak yang *drop out* atau berhenti menggunakan kontrasepsi. Keempat, persentase peserta KB baru memiliki target 97,94%, realisasi 63,62, dan capaian 64,96%. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan Pasangan Usia Subur yang belum menggunakan kontrasepsi jangka panjang, selama masa pandemi merasa takut untuk datang ke fasilitas kesehatan.

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator pertama persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif memiliki target 100%, realisasi 100, dan capaian 100%. Hal tersebut dikarenakan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Tribina cukup tinggi. Indikator kedua yaitu persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi memiliki target 10,33%, realisasi 12, dan capaian 116,17%. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal sehingga mendapatkan hasil maksimal.

Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran memiliki target 88%, realisasi 90,62, dan capaian 102,98%. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana perkantoran dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dan sarana dan prasarana yang ada tersebut dirawat dengan baik.

Selain Indikator Kinerja Program, juga terdapat indikator kinerja kegiatan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Indikator kinerja kegiatan dan realisasi capaiannya tiap triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian TSPK Per-triwulan

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
TUJUAN							
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Komponen rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki	93.7		93.58	93.58	93.58	99.87%
Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	(Jumlah indikator KLA yang terpenuhi : Jumlah indikator KLA) x 100%	100%		100	100	100	100%
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Surabaya dari hasil evaluasi KemenPAN dan RB	81		0	0	80.38	99.23%
SASARAN							
Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	(Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditindaklanjuti : jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditemukan/dilaporkan) x 100%	100%		100	100	100	100%
Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	(Capaian indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik x 50%) + (Capaian indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran x 50%)	100%		99.48	100	100	100%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase kecamatan yang belum resposif gender	(Jumlah Kecamatan yang Belum Responsif Gender sampai dengan tahun t : Jumlah Kecamatan) x 100%	0%		6.45	0.00	0.00	200%
Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	(Capaian peserta KB Mantap : Target peserta KB Mantap) X 100%	100%		0	60.21	60.21	60.21%
Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti aktifitas pengembangan usaha	Jumlah masyarakat yang aktif mengikuti aktivitas pengembangan usaha /Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pengembangan usaha	25%		0	25.00	25.00	100%
PROGRAM							
Persentase kelurahan yang responsif gender	(Jumlah Kelurahan yang responsif gender sampai dengan tahun (t) / jumlah Kelurahan) x 100%	41.56%		20.13	20.13	34.42	82.81%
Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	(Jumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan Responsif Gender dalam pelaksanaan kegiatan / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	100%		100	100	100	100%
Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	Diukur berdasarkan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat dan jejaring terhadap pelayanan PPT2A membandingkan antara harapan dan kondisi eksisting	74.98%		0	0	82.27	109.72%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase kelurahan ramah anak	(Jumlah kelurahan ramah anak sampai dengan tahun t : Jumlah kelurahan se Kota Surabaya) x 100%	100%		77.27	77.27	99.35	99.35%
Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	(Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani pada tahun (t) : Jumlah permasalahan perempuan dan anak pada tahun (t)) x 100%	100%		100	100	100	100%
Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan ber KB / jumlah pasangan usia subur x 100%	19.22%		18.67	18.67	18.67	102.86%
Persentase peserta KB aktif	Jumlah peserta KB aktif / jumlah pasangan usia subur x 100%	80.95%		81.33	81.33	81.33	100.47%
Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	Jumlah peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi / jumlah peserta KB aktif x 100%	2.78%		0.20	0.20	0.22	192.15%
Persentase peserta KB baru	Jumlah peserta KB baru / jumlah pasangan usia subur yang menjadi target peserta KB baru x 100%	97.94%		6.26	6.26	63.62	64.96%
Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	(Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif : Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)) x 100%	100%		0	100	100	100%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	(Jumlah MBR usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi pada tahun (t)/Jumlah MBR usia produktif yang didampingi pada tahun (t) X 100%	10.33%		0	12	12	116.17%
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance	88%		88.6	88.85	90.62	102.98%
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	(Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan tahun (t) : Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan tahun (t)) x 100%	100%		100	100	100	100%
Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	(Jumlah sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun (t) : Jumlah sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun (t)) x 100%	100%		98.97	100	100	100%
SUB KEGIATAN							
Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%		100%	100%	100%	100%
Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%		77.78%	57.14%	75%	75.00%
Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	72 lembaga		0 lembaga	72 lembaga	72 lembaga	100%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengarusutamaan Gender							
Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	23 kali		5 kali	11 kali	18 kali	78.26%
Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	Jumlah Perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	25 Orang			0 Orang	25 Orang	100%
Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	926 Orang		0 Orang	926 Orang	926 Orang	100%
Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	100%
Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	154 kampung		0 kampung	154 kampung	154 kampung	100%
Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	Jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	431 lembaga		221 lembaga	431 lembaga	440 lembaga	102.09%
Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	200 kasus		38 kasus	242 kasus	247 kasus	123.50%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga		2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%
Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	Jumlah anak yang mendapatkan layanan perlindungan (DAK)	75 Orang		0 Orang	0 Orang	75 Orang	100%
Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	1566 Orang		1566 Orang	1566 Orang	1566 Orang	100%
Jumlah Kader IMP yang dibina	Jumlah Kader IMP yang dibina	1566 Orang			1566 Orang	1566 Orang	100%
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1950 Orang			0 Orang	896 Orang	45.95%
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	19 unit		0 unit	19 unit	19 unit	100%
Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	325 orang		0 Orang	0 Orang	114 orang	35.08%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	31 Lembaga		0 lembaga			
Jumlah Kampung KB yang dibina	Jumlah Kampung KB yang dibina	31 Lembaga			31 Lembaga	31 Lembaga	100%
Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	Jumlah orang yang difasilitasi dan mendapatkan pendampingan inkubasi usaha mandiri	50 orang		0 Orang	25 Orang	50 orang	100%
Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	Jumlah Sarana BKB Kit yang disediakan	38 unit		0 unit	0 unit	0 unit	0%
Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	Jumlah rumah kreatif yang dikelola selama 12 bulan	1 bangunan		1 bangunan	1 bangunan	1 bangunan	100%
Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan keluarga sejahtera	480 orang		310 Orang	480 orang	484 orang	100.83%
Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	Jumlah pendamping yang mengikuti pembinaan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang didampingi	875 orang		0 Orang	675 Orang	875 orang	100%

INDIKATOR	FORMULASI	TARGET	REALISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	2 lembaga		2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%
Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	Jumlah lembaga yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi	15 lembaga		8 lembaga	12 lembaga	15 lembaga	100%
Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%		90%	81.25%	100%	100%

Hampir semua target telah tercapai dengan capaian 100%, ada juga beberapa kegiatan yang memiliki capaian melebihi target. Namun untuk kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan karena masih dalam masa pandemi sehingga banyak fasilitas kesehatan KB yang masih belum maksimal melayani, serta pelayanan KB MOP dan MOW tidak optimal dilaksanakan ditambah juga dengan banyak akseptor yang ragu dan mengundurkan diri karena takut dengan penyebaran covid-19, sehingga dari jumlah target yang ditetapkan sebanyak 325 orang akseptor hanya mampu terealisasi 144 orang akseptor dengan total capaian dari target sejumlah 35,08%.

REALISASI ANGGARAN

Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang disampaikan sebelumnya, total alokasi anggaran adalah Rp. 31.226.279.500, sedangkan realisasi penyerapan anggaran adalah Rp. 23.648.657.285,- atau 75,73% dari total alokasi anggaran. Capaian anggaran per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp11.132.285.009	Rp 9.457.455.231	84,96%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.762.806.462	Rp 9.159.325.766	85,10%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 369.478.547	Rp 298.129.465	80,69%
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 1.050.047.791	Rp 875.666.452	83,39%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 377.689.171	Rp 293.546.399	77,72%
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp 672.358.620	Rp 582.120.053	86,58%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp 251.199.169	Rp 217.578.707	86,62%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 251.199.169	Rp 217.578.707	86,62%
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 231.105.948	Rp 72.571.600	31,40%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 145.942.050	Rp 17.236.600	11,81%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 85.163.898	Rp 55.335.000	64,97%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 803.068.048	Rp 740.751.420	92,24%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 213.172.000	Rp 204.019.200	95,71%
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 589.896.048	Rp 536.732.220	90,99%
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 2.569.084.419	Rp 2.027.531.035	78,92%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Rp 940.284.843	Rp 852.756.151	90,69%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 1.628.799.576	Rp 1.174.774.884	72,13%
Meningkatnya kualitas pelayanan KB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 8.759.282.847	Rp 4.889.462.157	55,82%	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 966.207.266	Rp 933.654.468	96,63%
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp 1.635.538.000	Rp 756.381.000	46,25%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp 2.705.778.000	Rp 410.685.650	15,18%
						Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp 1.550.398.000	Rp 1.427.475.000	92,07%
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp 329.537.581	Rp 297.020.039	90,13%
						Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp 1.571.824.000	Rp 1.064.246.000	67,71%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 2.989.464.963	Rp 2.331.263.785	77,98%	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp 899.036.417	Rp 829.640.699	92,28%
						Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 695.935.024	Rp 197.772.072	28,42%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 328.233.924	Rp 309.233.087	94,21%
						Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 131.145.000	Rp 131.145.000	100,00%
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 556.907.471	Rp 513.299.603	92,17%

Sasaran	Program	Anggaran Program (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp 378.207.127	Rp 350.173.324	92,59%
Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 3.440.741.306	Rp 3.036.376.898	88,25%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 3.440.741.306	Rp 3.036.376.898	88,25%
TOTAL		Rp31.226.279.500	Rp 23.648.657.285	75,73%	TOTAL		Rp 31.226.279.500	Rp 23.648.657.285	75,73%

*Data realisasi anggaran diambil dari E-Controlling Tahun 2021 pada tanggal 23 Desember 2021.

Berdasarkan capaian program dan kegiatan tersebut, dapat dilihat efisiensi perbandingan capaian kinerja dengan anggaran, pada tabel 3.7

Tabel 3.7 Efisiensi Capaian Kinerja dengan Anggaran

Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi Anggaran (Capaian kinerja-Capaian Anggaran)
Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan	200%	84,02%	115,98%
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	100%	78,84%	21,16%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan KB	60,21%	55,82%	4,39%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	77,98%	22,02%
Terjaganya Kesesuaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan	100%	85,73%	14,27%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja berhasil melebihi capaian anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penggunaan sumber daya saat pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjabaran perencanaan kinerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang telah dijelaskan pada bab II, dan penjabaran capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada bab III, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait capaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari capaian indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan di perubahan perjanjian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021, diperoleh rata-rata nilai capaian 112,04%. Nilai capaian tertinggi terdapat pada indikator 'Persentase kecamatan yang belum responsif gender' dengan perolehan capaian 200%. Sedangkan nilai capaian terendah terdapat pada indikator 'Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap' dengan perolehan 60,21%.

Dari anggaran yang terdapat pada ke-9 program, rata-rata penyerapan anggaran di masing-masing program adalah 75,73%. Penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada "Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)" dengan capaian 92,24%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada "Program Perlindungan Perempuan" dengan capaian 31,40%.

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dan meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata perubahannya.

Surabaya, 24 Desember 2021

PIK KEPALA DINAS,



Antiek Sugiharti, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196709101996022001